



RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang	1
B...Landasan Hukum	3
C...Maksud dan Tujuan	6
D...Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
A...Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Tabalong Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
B...Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tabalong.....	20
C...Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Kab. Tabalong.....	24
D...Review Terhadap Rancangan RKPD	39
E...Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PRORGAM DAN KEGIATAN	
A...Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
B...Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Tabalong.....	49
C...Program dan Kegiatan.....	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V PENUTUP.....	60

KATA PENGANTAR

Salam Tangguh,

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan Taupik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Peanggunan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 telah diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Badan Peanggunan Bencana Daerah merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Peanggunan Bencana Daerah maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat pada tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Badan Peanggunan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan bagi Badan Peanggunan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dalam menyusun program dan kegiatan dalam penanggunan bencana selama satu tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan penanggunanagn bencana di Kabupaten Tabalong.

Tanjung, Maret 2025

Kepala Pelaksana



HARIS FAKHROZI, ST, MT
NIP. 19721024 200501 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

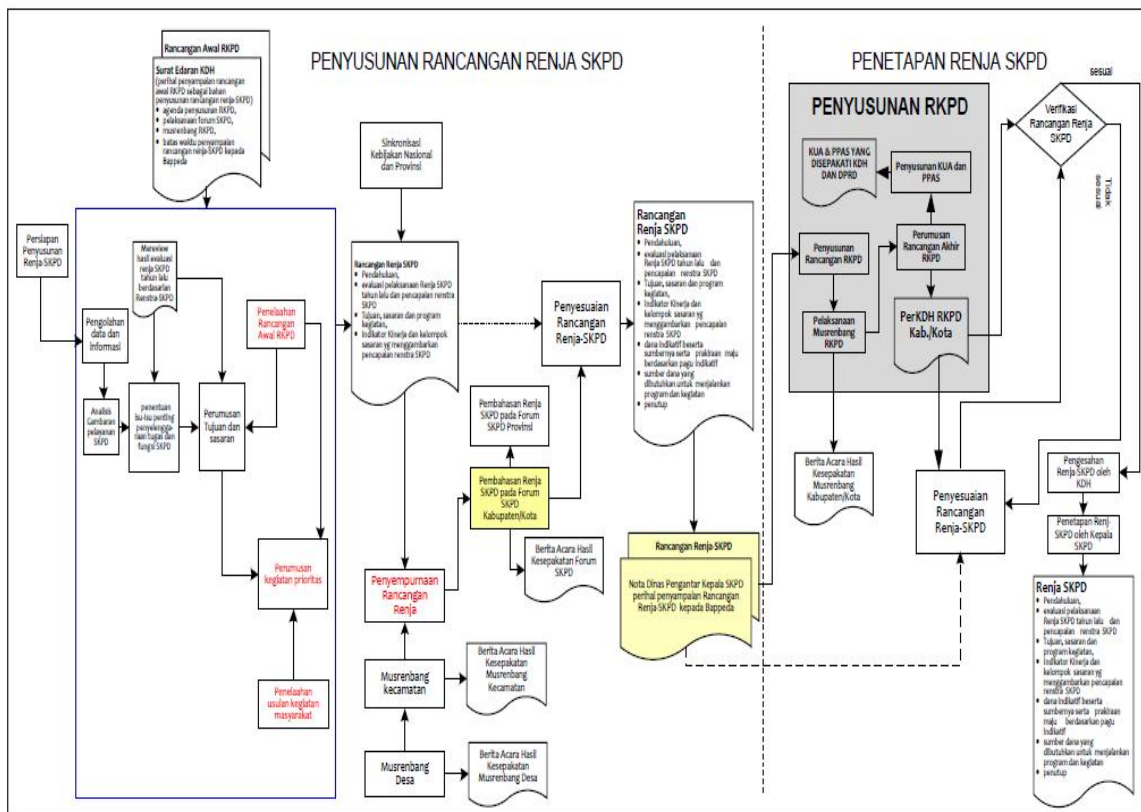
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Perubahan. Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Dalam menjalankan amanat tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebagai perangkat daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Untuk penyusunan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 berpedoman pada Renstra BPBD Tahun 2025 - 2029,

dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten



B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RI Tahun 1965 No.51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan

- Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 28. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 Triwulan I, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 adalah:

- a) Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025;

- b) Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c) Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
- d) Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.;
- e) Untuk memasukkan program kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD TW 1 (tahun n) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan TW 1.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Renja Perubahan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- D. Review terhadap RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- C. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan TW 1 dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Tabalong adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tabalong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPBD Kabupaten Tabalong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Tabalong selama Triwulan 1 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator

kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

a) Evaluasi Program Tahun 2025 TW 1

Pada tahun 2025 total anggaran adalah sebesar Rp. **12.086.388.321** (Dua Belas Milyar Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. **Rp. 10.539.359.589** (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah). Pencapaian 87,13%, yang dijabarkan melalui 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPBD
Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Sampai Vdengan TW 1

No	Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
I	<i>Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten</i>	5.586.513.706	4.963.843.213
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	49.374.000	49.103.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.717.771.000	2.313.419.277
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.000.000	29.250.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.204.785.961	1.157.265.359
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	665.632.745	581.465.680

	Pemerintah Daerah		
6.	Pemeliharaan Barng Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	893.950.000	882.442.897
II	<i>Program Penanggulangan Bencana</i>	11.607.938.340	10.987.332.030
7.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	6.499.874.615	5.517.403.976
8.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	154.757.030	139.032.930
9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.521.328.286	4.714.269.170
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	649.109.774	494.693.835
Jumlah		12.086.388.321	10.539.359.589

b) Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2025 Sampai Dengan Semester 1

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2025 dengan anggaran sebesar **19.813.967.341** (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh satu Rupiah) kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal bisa lebih dari tahun 2024.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Tabalong ***Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana***, pada dasarnya kegiatan BPBD Kabupaten Tabalong mendukung arah kebijakan ke lima Kabupaten Tabalong dimana masyarakat merasa lebih aman dan lebih siap dalam menghadapi bencana. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut tersebut, BPBD mempunyai fungsi komando, koordinasi dan pelaksana terkait

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong baik pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program penanggulangan bencana maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2025, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sebagai berikut:

- a. Tipologi BPBD Kabupaten Tabalong adalah B, dengan kepala pelaksana diduduki eselon 3 sehingga untuk berkoordinasi dengan instansi lain agak kesulitan.
- b. Rendahnya Aksesibilitas informasi kebencanaan di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong;
- c. Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi komando dan pelaksanaan;
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- f. Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra BPBD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh BPBD Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a) Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur kebencanaan.
 - b) Peningkatan kemampuan teknis aparat kebencanaan.
 - c) Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
 - d) Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
- 2) Strategi Mendorong masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam kondisi siaga bencana dan tanggap darurat bencana dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a) Membangun kemampuan dan kolektivitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana.
 - b) Pemantapan partisipasi masyarakat dalam proses penanggulangan bencana.
 - c) Mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah.

- 3) Strategi Pemberdayaan seluruh sumber daya yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan : Meningkatkan pelayanan kebencanaan pada saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
- 4) Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabalong dengan arah kebijakan :
 - a) Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tabalong dan BPBD Kabupaten Tabalong.
 - b) Melaksanakan penanggulangan bencana yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar SKPD.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD tahun
2025 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Kabupaten Tabalong

Nama SKPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan /Sub Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program Renstra SKPD Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan/Su b Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan /Sub Kegiatan 2025			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2025	Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 s/d 2029	
									Target Renja SKPD Tahun 2025	Realisasi Renja SKPD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2025 s.d Semester 1	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7 +9)	(11)=(10/4)
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

1	05	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Berkualitas	9 Dok	9 Dok	9 Dok	4 Dok	40%	9 Dok	9 Dok	100%
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangann Perangkat Daerah									
1	05	01	2.02	001	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20 Org	13 Org	20 Org	28 Org	100%	20 Org	28 Org	100%
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1	05	01	2.05	002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	50 Org	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.05	009	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	10 Org	5 Org	10 Org	5 Org	50%	10 Org		100%
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah								

1	05	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
1	05	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Per Undang Undangan	12 Dok	12 Laporan	12 Dok	6 Dok	50%	12 Dok	12 Laporan	100%
1	05	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	50 laporan	100 Laporan	40 Laporan	40%	100 Laporan		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah								
1	05	01	2.08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	12 Laporan	100%

1	05	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	05	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan	12 Laporan	100%
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemel BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	05	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan pajaknya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	5 Unit	100%
1	05	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Oeprasional Atau Lapangan	34 Unit	34 Unit	34 Unit	34 Unit	100%	34 Unit	34 Unit	100%

1	05	01	2.09	007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya Yang Dipelihara	41 Unit	41 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	41 Unit	41 Unit	100%
1	05	03			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana								
1	05	03	2.01	007	Sosialisasi Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota Secara tatap Muka Kepada Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Yang Ada Di kawasan Tempat Tinggalnya	3000 Org	150 Org	3000 Org	3000 Org	100%	1000 org	1000 o%	100%
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								

1	05	03	2.02	00 15	Penyediaan Peralatan Perlindungan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri Bagi Individu Warga Negara, Keluarga Maupun Petugas	40 Unit	40 Unit	40 Unit	20 Unit	50%	40 Unit		100%
1	05	03	2.02	00 18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bancana	Jumlah Aparatur Dan Warga Negara Yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Org	1000Org	1000 Org	1000 Org	100%	1000 Org		100%
1	05	03	2.02	00 19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Pelatihan Tanggap Bencana Alam	12 Kawasn	0	12 Kawasn	-	0%	12 Kawasn		100%
1	05	03	2.02	00 20	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	12 Kawasan	12 Kawasan	12 Kawasan	12 Kawasan	100%	12 Kawasan		100%
1	05	03	2.02	00 21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	Jumlah Personil TRC Yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dan Manajerialnya	30 Org	30 Org	30 Org	-	0%	30 Org		100%

1	05	03	2.02	00 22	Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kab/Kota (Per Jenis Acaman Bencana) Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama 1 (Satu) Tahun	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	0%	-	-	0%
1	05	03	2.02	00 26	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	50%	12 Laporan		100%
1	05	03	2.02	00 28	Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Di Kawasan Rawan Bencana Kab/Kota Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	12 Kawasan	0	12 Kawasan	-	0%	12 Kawasan		100%
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana								

1	05	03	2.03	00 02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1 x 24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dok	2 Dok	3 Dok	-	0,00%	3 Dok		100%
1	05	03	2.03	00 03	Pencarian,Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, Dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	40 Org	40 Org	40 Org			40 Org		100%
1	05	03	2.03	00 09	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	500 Org		500 Org	300 Org	40%	500 Org		100%
1	05	03	2.03	00 10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Dok SK Penetapan Status Darurat Bencana Dan SKPDB Yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi	2 Dok	-	2 Dok	-	0%	2 Dok		100%

						Terpadu								
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								
1	05	03	2.04	001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah	2 Dok	-	2 Dok	-	0%	2 Dok		100%
1	05	03	2.04	004	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data Dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia	4 Dok	-	4 Dok	-	0%	4 Dok		100%

1	05	03	2.04	00 1	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Kegiatan Pascabencana Disemua Sektor Sesuai Berdasarkan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Yang Dilegalkan	3 Keg	1 Dok	3 Keg	-	0%	3 Keg		100%
1	05	03	2.04	00 1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab/Kota	Jumlah Penyelesaian Dokumen Maklumat Pelayanan Sampai Dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling Lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dok	-	4 Dok	-	0%	4 Dok		100%

Tanjung. Juli 2025

Kepada Pelaksana BPBD



HARIS FAKHROZI, ST, MT

NIP. 19721024 200501 1 004

B. Analisis Kerja Pelayanan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong.

Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang *ex-officio* adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada table berikut.

TABEL 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Tabalong

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (Thn n-2)	Tahun 2022 (Thn n-1)	Tahun 2023 (Thn n)	Tahun 2024 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase (%) penyelesaian penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	-	-	100%		
2.	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Persentase (%) penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	
4.	Persentase (%) penyelesaian penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Rekon)	100%		100%	100%	100%	100%	-	-	-	100%	

	sampai dengan dinyatakan sah/legal											
5.	Persentase (%) jumlah aparaturn dan Warga Negara yang ikut pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.	100%		100%	100%	100%	100%	-	25%	100%	100%	
6.	Persentase (%) jumlah aparaturn dan Warga Negara yang ikut pelatihan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	-	0,06%	100%	100%	
7.	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
9.	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10.	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	jam untuk setiap status darurat bencana.											
11.	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana.	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Tingkat kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

Sejak dibentuk pada tahun 2017 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong tanggal 25 Agustus 2017, dan Peraturan Bupati Tabalong tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong masih dalam proses. BPBD Kabupaten Tabalong merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BPBD Kabupaten Tabalong mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. Sekretariat;
- e. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. Kasi Kedaruratan dan Logistik;
- g. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- h. UPT Pemadam Kebakaran; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong yang telah diubah dengan Peraturan

daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong berdasarkan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 adalah :

- a. Perumusan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu

oleh Unsur Pengarah yang mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.
- b. Pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dipimpin Kepala Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
- c. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Kasi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penetapan rumusan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
- b. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- d. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- e. Penetapan rumusan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- g. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penanggulangan bencana.

Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Unsur Pelaksana, yaitu :

- a. Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- b. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi

pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan pola kerjasama penanggulangan bencana.

c. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 2) Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- 3) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- 4) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- 5) Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
- 6) Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
- 7) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
- 8) Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 10) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 11) Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 12) Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Berdasarkan Tugas dan Fungsi tersebut di atas, uraian tugas Kepala Pelaksana, Sekretariat, Kepala Seksi, UPT Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan rencana dan program penanggulangan bencana.
- 2) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 4) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 5) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dan mengatur proses penanggulangan bencana.
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan evaluasi dan pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.
- 7) Mengkoordinasikan, memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan.
- 8) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.
- 9) Menyampaikan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- 10) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- 12) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.
- 13) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi Pemerintah, Swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan.
- 15) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

b. Sekretaris, mempunyai tugas :

- 1) Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 2) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pada sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian.
- 3) Menyusun rencana program pada sub bagian program, sub bagian keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian.
- 4) Menetapkan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Seksi secara terpadu.
- 5) Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Badan.
- 6) Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- 7) Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- 8) Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
- 9) Menetapkan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
- 10) Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan.

- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 13) Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 14) Menyusun Rencana Kerja Anggaran BPBD.
- 15) Menyusun laporan kinerja BPBD.
- 16) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan laporan kinerja Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 17) Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan laporan Realisasi Anggaran Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 18) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam penanggulangan bencana.
- 19) Mengkoordinasikan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas.
- 20) Menyusun laporan realisasi anggaran Sekretariat.
- 21) Menyusun laporan kinerja program Sekretariat.
- 22) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, mempunyai tugas

- 1) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

- 3) Melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana.
- 4) Membuat rencana aksi daerah.
- 5) Melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana.
- 6) Melaksanakan analisis kebutuhan potensi sumber daya bidang penanganan bencana.
- 7) Melaksanakan identifikasi dan pendataan kejadian bencana.
- 8) Menyusun peta resiko bencana.
- 9) Melaksanakan sosialisasi daerah rawan bencana dan teknis penanganan bencana.
- 10) Melaksanakan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dibidang penanganan bencana.
- 11) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan sistem penanganan bencana terpadu.
- 12) Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan potensi sumber daya penanganan bencana.
- 13) Merumuskan kebijakan dan fasilitasi, menghimpun dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan daerah rawan bencana.
- 14) Melaksanakan survey dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan bidang tugas pencegahan bencana.
- 15) Melaksanakan bimbingan, penyuluhan, mitigasi dan pemantauan.
- 16) Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) serta menghimpun potensi rakyat untuk memenuhi syarat menjadi Tim Penolong dalam penanganan bencana (Rescue).
- 17) Melaksakana penyajian data dan informasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

- 18) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 19) Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 20) Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas :

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan dan logistik.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang kedaruratan dan logistik.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang kedaruratan dan logistik.
- 4) Mengkoordinasikan pembentukan tim kaji cepat.
- 5) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
- 6) Melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana.
- 7) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana.
- 8) Melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang kedaruratan dan logistik.
- 9) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang kedaruratan dan logistik.
- 10) Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kedaruratan dan logistik.
- 11) Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- 12) Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Kedaruratan dan Logistik.
- 13) Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Kepala Seksi Rekonstruksi dan Rehabilitasi, mempunyai tugas

- 1) Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
- 2) Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
- 4) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
- 5) Melaksanakan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana.
- 6) Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pengerahan sumber daya penanganan bencana.
- 7) Melaksanakan penyajian data dan informasi dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
- 8) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
- 9) Melaksanakan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang rehabilitasi danrekonstruksi.
- 10) Melaksanakan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Rehabilitasi danRekonstruksi.
- 11) Melaksanakan bahan penyusunan laporan kinerja program Seksi Rehabilitasi danRekonstruksi.
- 12) Melaksanakan penyajian tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

a) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:

- 1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat tapak.
- 2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara regular.
 - 2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat.
 - 3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial.
 - 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat.
 - 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
- b) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Meliputi rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:

- 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.
- 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif.
- 3) Belum terbentuknya kelembagaan dimasyarakat sebagai upaya penanggulangan bencana.
- 4) Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah.

Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di Kabupaten Tabalong perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif.

Hambatan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi khususnya di Kabupaten Tabalong ini antara lain :

- 1) Lokasi bencana yang sulit dijangkau.
- 2) Kejadian bencana yang tidak dapat diprediksi (*unpredictable*).
- 3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap upaya penanganan bencana.
- 4) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam.
- 5) Adanya keterbatasan sarana informasi dan komunikasi sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data dan informasi dari kecamatan ke kabupaten.
- 6) Luasnya wilayah Kabupaten Tabalong dengan jenis potensi bencana yang beragam.
- 7) Alokasi anggaran penanggulangan bencana yang belum mencukupi.

- 8) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih berjalan secara sektoral.
 - 9) Masih terbatasnya sarana prasarana penanggulangan bencana.
 - 10) Kurangnya tenaga staf yang dimiliki BPBD Kabupaten Tabalong.
 - 11) Sarana dan prasarana yang belum memadai.
- c) Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 1) Kurangnya kualitas dan tanggung jawab masyarakat terhadap perkembangan daerahnya khususnya tentang bencana alam dan kebakaran.
 - 2) Kurangnya kesiapan anggota BPK / Satlak PB dalam menangani musibah baik bencana alam atau kebakaran.
 - 3) Bertambahnya potensi timbulnya wabah penyakit dan banjir akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembuangan sampah khususnya membuang sampah ke sungai.
- d) Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

TANTANGAN

- 1) Terjadinya perubahan Struktur Organisasi dengan perubahan Bidang yang menyebabkan perlu penyesuaian tugas dan fungsi.
- 2) Terjadinya persaingan antar aparatur serta ada kecendrungan mementingkan kegiatan program daripada pelaksanaan pelayanan rutin terhadap tugas dan fungsinya.
- 3) Terjadinya mutasi pejabat / pegawai yang berakibatkan terhambatnya pelaksanaan tugas karena yang bersangkutan harus belajar mulai awal.

- 4) Kurang kuatnya landasan hukum dari segala permasalahan yang dihadapi sehingga terhambatnya keputusan akan diambil dengan jalan koordinasi antar instansi.
- 5) Adanya tumpang tindih dalam pengambilan dan pemberian kebijakan sehingga menghambat penyelesaian permasalahan.
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah Kabupaten Tabalong terhadap aturan dan peraturan yang berlaku.
- 7) Penyampaian laporan kejadian bencana yang tidak akurat berdampak pada pembuatan laporan yang tidak akurat juga.

PELUANG

- 1) Tersedianya peraturan perundang – undangan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 2) Dukungan pemerintah daerah dalam Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Bidang Pemadam Kebakaran.
- 3) Kemajuan teknologi informasi.

KEKUATAN

- 1) Dukungan dan persetujuan Bupati terhadap rencana program dan kegiatan.
- 2) Koordinasi yang baik antara instansi terkait di lingkungan pemerintah kabupaten.
- 3) Personil pegawai yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk maju dan bertanggung jawab.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

KELEMAHAN

- 1) Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 2) Kurangnya kualitas keterampilan pegawai, baik yang profesional secara teknik maupun operasional.
- 3) Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal

D. Review Terhadap RKPD Tahun 2025

Review terhadap RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Sampai Dengan TW 1 dilakukan dengan membandingkan antara RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Tabalong tahun 2025. Hasil Review dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan RKPD tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				18.749.837.728					19.100.530.535	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				6.653.240.123	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				11.044.362.154	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.198.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.198.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	51.198.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	9 Dokum en	51.198.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.583.245.055	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.884.662.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Ta balong	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	16 Orang/Bu lan	2.583.245.055	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Tab along	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	7.884.662.000	Penambahan Kenaikan Tipologi

Administrasi Kepegawaian					220.000.000	Administrasi Kepegawaian				217.900.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Ta balong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Orang		120.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Tab along	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Orang	117.900.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kab.Ta balong	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	11 Orang		100.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kab.Tab along	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	11 Orang	100.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.043.047.073	Administrasi Umum Perangkat Daerah				826.536.321	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Ta balong	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket		9.289.830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab.Tab along	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	8.118.780	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Ta balong	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 Paket		438.890.558	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Tab along	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	1 Paket	426.000.004	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Ta balong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	29.909.685	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab.Tab along	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	27.386.885	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	12 Dokumen	15.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Ta balong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	549.957.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Tab along	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	349.950.612	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				740.531.195	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				983.471.833	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Ta balong	Jumlah Laporan Penyediaan Surat menyurat	12 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tab along	Jumlah Laporan Penyediaan Surat menyurat	12 Laporan	1.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Ta balong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	12 Laporan	129.767.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Tab along	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber	12 Laporan	129.767.000	

								Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Ta balong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	608.964.195	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tab along	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Lapora n	851.904.833	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.015.218.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.080.594.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Ta balong	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	247.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tab along	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3 Unit	247.900.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Ta balong	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34 Unit	604.470.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tab along	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34 Unit	623.790.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Ta balong	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tab along	Terlaksanan ya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya		-	
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab.Ta balong	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41 Unit	19.610.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab.Tab along	Terlaksanan ya Pemeliharaa n Aset Tetap Lainnya	41 Unit	19.610.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Ta balong	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1.143.238.800	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tab along	Terlaksanan ya Pemeliharaa n/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	189.294.000	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					12.096.597.605	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				8.056.168.381	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					356.143.200	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				302.664.920	
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab.Ta balong	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	150 Orang	356.143.200	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab.Tab along	Jumlah Orang yang Mendapatk an Sosialisasi, Komunikasi,	150 Orang	302.664.920	

			Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya			
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				9.241.337.805	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				6.008.922.709	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Rencana Penanggula ngan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan	10 Kawasan	139.224.500	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti	10 Kawasa n	139.224.500	

			Mitigasi Bencana					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2.519.040.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2.323.740.000	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Ta balong	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Paket	5.910.933.445	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Tab along	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Paket	3.097.278.349	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab.Ta balong	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	298.982.350	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab.Tab along	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan	76.322.350	

	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	83.225.650	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	83.225.650	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	200.000.000	
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Ta balong	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	68.986.960	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab.Tab along	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	1000 Orang	68.186.960	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Ta balong	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 KK	20.944.900	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab.Tab along	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 KK	20.944.900	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.719.116.600	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.376.055.364	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab.Ta balong	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah	2 Dokumen	-	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab.Tab along	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian	2 Dokumen	-	

			Prioritas					Luar Biasa Penyakit/W abah Prioritas			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	1.322.885.200	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokum en	996.223.964	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	40 kejadian/ orang	80.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	40 kejadia n/oran g	80.000.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	276.727.900	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatk an Distribusi Logistik Penyelamat an dan Evakuasi Korban Bencana	500 orang	260.327.900	

	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Ta balong	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Dokumen	-	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Tab along	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Dokumen	-	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab.Ta balong	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	39.503.500	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab.Tab along	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	2 Dokumen	39.503.500	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				780.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				368.525.388	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	250.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen	108.200.000	

	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	10 Dokumen	150.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaa n Bencana Daerah	10 Dokum en	59.146.000	
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab.Ta balong	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	4 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab.Tab along	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaa n	4 Dokum en	33.785.000	
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Ta balong	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	3 Dokumen	230.000.000	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tab along	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruks i Pasca Bencana (R3P)	3 Dokum en	167.394.388	

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut beberapa penelaahan usulan program dan Kegiatan dari masyarakat melalui musrenbang.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui Musrenbang

No	Usulan Permasalahan	Program	Lokasi
1	Diperlukan alat pemadam kebakaran	Penanggulangan Bencana	Desa Hapalah Kecamatan Banua Lawas
2	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Sungai Anyar Kecamatan Banua Lawas
3	Kurangnya Seragam Dan APD	Penanggulangan Bencana	Desa Tanta Kec.tanta
4	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Penanggulangan Bencana	Kel Mabuun Kecamatan Murung Pudak
5	Tidak Adanya Peralatan Evakuasi Korban Banjir	Penanggulangan Bencana	Desa Binturu Kecamatan Kelua
6	Peningkatan Fasilitas Pencegahan Bencana Alam	Penanggulangan Bencana	Desa Masintan Kecamatan Kelua
7	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulangan Bencana	Pudak Setegal Kecamatan Kelua
8	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Binturu Kecamatan Kelua
9	Desa Sungai Buluh Yang Berada Di Bantaran Sungai Untuk itu perlu adanya bantuan perahu karet utnuak kesiapsiagaan banjir	Penanggulangan Bencana	Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua
10	kurangnya pengetahuan dan sarana prasaran pendukung tentang kesiapsiagaan bencana, untu itu perlu pasilitas	Pelayanan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana	Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua

	pendukungnya		
11	Peningkatan fasilitas pencegahan bencana alam	Penanggulangan Bencana	Desa Halangan Kecamatan Pugaan
12	Belum Adanya Peralatan Pemadam Kebakaran	Penanggulangan Bencana	Desa Juai Kecamatan Tanjung
13	Belum adanya peralatan penanggulangan banjir	Penanggulangan Bencana	Desa Juai Kecamatan Tanjung
14	Tidak Adanya APD Sarana Penunjang Lainnya	Penanggulangan Bencana	Desa Nawin Kecamatan Haruai
15	Pelatihan Tanggap Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Wirang Kecamatan Haruai
16.	Belum Ada Pelatihan Darurat Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Hayup Kecamatan Haruai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Apabila kita melihat kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, maka boleh dikatakan secara umum sasaran yang hendak dicapai sudah diakomodir dalam Renja Perubahan BPBD Kabupaten Tabalong, namun yang menjadi penghambat kegiatan ini terlaksana dengan baik di Kabupaten Tabalong adalah :

1. Belum Terpenuhinya Rasio Jumlah Penduduk Di Kawasan rawan bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana.
2. Belum Terpenuhinya Rasio Jumlah Penduduk Yang Memperoleh Edukasi Dan Simulasi Jenis dan Ancaman Bencana
3. Belum tercukupinya sarana prasarana Penanggulangan Bencana.
4. Masih Kurangnya Mitigasi Bencana di Masyarakat
5. Masih Kurangnya SDM dalam Merespon Status Darurat Bencana
6. Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Yang Sulit Dijangkau
7. Masih Kurangnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Penanggulangan Bencana
8. Masih Kurangnya Teknologi Informasi Dalam Mitigasi Bencana

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, maka unit organisasi harus merumuskan visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih operasional dan terarah berupa maksud dan tujuan organisasi.

Melalui perumusan Misi Kabupaten Tabalong akan memberikan arah jangka panjang dan terciptanya stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kabupaten Tabalong, meletakkan acuan dan pedomandasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan serta memberikan kenyamanan danketentraman kepada masyarakat Kabupaten Tabalong terutama yangberada pada daerah yang rawan bencana, sehingga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari akan selalu merasa tenang dalam beraktivitas dan bekerja. Berikut dapat dilihat tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong yaitu

TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Tujuan		Sasaran		Indikator	Target
1.	Menurunkan Indeks Resiko Bencana	1.	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,55
		2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat daerah	BB

C. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 terdiri dari 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan jumlah pagu dana sebesar Rp. 19.100.967.341,- (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun kelima dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2025-2026.

Adapun program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

(1.05.01), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. 1.05.01.2.05 Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (1.05.03), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
- b. 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel 4.1

Rumus Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 *Kurangin Efisiensi

Kode.					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025				Catatan	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)	Sumber		Target Kinerja	Kebutuhan Dana (Pagu Indikatif)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA				19.100.967.341				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				11.044.362.154				
1	02	01	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.198.000				
1	02	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Tabalong	9 Dokumen	51.198.000				
1	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.884.662.00				
1	02	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan	Kab.Tabalong	29 Orang/Bulan	7.884.662.00				

						Tunjangan ASN								
1	02	01	205		Administrasi Kepegawaian				217.900.000					
1	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab.Tabalong	60 Orang	117.900.000					
1	02	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Kab.Tabalong	11 Orang	100.000.000					
1	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah				826.536.321					
1	02	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Yang Disediakan	Kab.Tabalong	1 Paket	8.118.780					
1	02	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Kab.Tabalong	1 Paket	426.080.044					
1	02	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang disediakan	Kab.Tabalong	1 Paket	27.386.885					

1	02	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan Yang Disediakan	Kab.Tabalong	12 Dokumen	15.000.000				
1	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab.Tabalong	100 Laporan	349.950.612				
1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				983.471.833				
1	02	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Surat menyurat	Kab.Tabalong	12 Laporan	1.800.000				
1	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Kab.Tabalong	12 Laporan	129.767.000				
1	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Tabalong	12 Laporan	851.904.833				

1	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.080.594.000				
1	02	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab.Tabalong	3 Unit	247.900.000				
1	02	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Tabalong	34 Unit	623.790.000				
1	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Tabalong		-				
1	02	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya a Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab.Tabalong	41 Unit	19.610.000				

1	02	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Tabalong	1 Unit-	189.294.000				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				8.056.156.381				
1	05	03	201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				302.664.920				
1	05	03	201	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Kab.Tabalong	-	-				
1	05	03	201	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota Secara Tatap Muka Kepada Penduduk Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Yang Ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya	Kab.Tabalong	150 Orang	302.664.920				

1	05	03	202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			6.008.927.709				
1	05	03	202	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan an Bencana yang Dilegalisasi	Kab.Tabalong	-	-			
1	05	03	202	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Kab.Tabalong	10 Kawasan	139.224.500			
1	05	03	202	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab.Tabalong	12 Dokumen	2.323.740.000			
1	05	03	202	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga,	Kab.Tabalong	1 Paket	3.097.278.349			

						maupun Petugas								
1	05	03	202	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab.Tabalong	3 Kawasan	76.322.350					
1	05	03	202	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Kab.Tabalong	30 Orang	83.225.650					
1	05	03	202	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab.Tabalong	1 Dokumen	200.000.000					
1	05	03	202	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Kab.Tabalong	1000 Orang	68.186.960					
1	05	03	202	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap	Kab.Tabalong	50 KK	20.944.900					

						Bencana Alam								
1	05	03	203		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.376.055.364					
1	05	03	203	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Kab.Tabalong	2 Dokumen	-					
1	05	03	203	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kab.Tabalong	3 Dokumen	996.223.964					
1	05	03	203	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Kab.Tabalong	40 kejadian/orang	80.000.000					
1	05	03	203	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan	Kab.Tabalong	500 orang	260.327.900					

						Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1	05	03	203	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab.Tabalong	2 Dokumen	-					
1	05	03	203	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Kab.Tabalong	2 Dokumen	39.503.500					
1	05	03	204		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				368.525.388					
1	05	03	204	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulang	Kab.Tabalong	2 Dokumen	108.200.000					

						an Bencana di Daerah							
1	05	03	204	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Kab.Tabalong	10 Dokumen	59.146.000				
1	05	03	204	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Kab.Tabalong	4 Dokumen	33.785.000				
1	05	03	204	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Kab.Tabalong	3 Dokumen	167.394.388				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

(Lihat Lampiran)

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KABUPATEN TABALONG

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun 2022	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Perubahan				Unit Kerja Perangkat at Daerah Penang-gung-jawab	Lokasi		
										Tahun 2025		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renja Perangkat Daerah					
										Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
		1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	BB	BB	11,044,362,154		11,044,362,154				
		1	02	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51,198,000		51,198,000				
		1	02	01	2	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	51,198,000	9 Dokumen	51,198,000	BPBD	Muring Pudak		
		1	02	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7,884,662,000		7,884,662,000				
		1	02	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	29 Orang	7,884,662,000	15 Orang	7,884,662,000	BPBD	Muring Pudak		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						217,900,000		217,900,000		
		1	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	60 Orang	117,900,000	60 Orang	117,900,000	BPBD	Muring Pudak		
					01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	20 Orang	100,000,000	20 Orang	100,000,000	BPBD	Muring Pudak	
		1	02	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah						826,536,321		826,536,321		
		1	02	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	8,118,780	1 Paket	8,118,780	BPBD	Muring Pudak		

						yang Disediakan							
1	02	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	426,080,044	1 Paket	426,080,044	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27,386,885	1 Paket	27,386,885	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	15,000,000	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	100 Laporan	349,950,612	100 Laporan	349,950,612	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				983,471,833		983,471,833		
1	02	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1,800,000	12 Laporan	1,800,000	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	129,767,000	12 Laporan	129,767,000	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	851,904,833	12 Laporan	851,904,833	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,080,594,000		1,080,594,000		
1	02	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34	3 Unit	247,900,000	3 Unit	247,900,000	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 Unit	34 Unit	623,790,000	34 Unit	623,790,000	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	BPBD	Murung Pudak
1	02	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	41 Unit	41 Unit	19,610,000	41 Unit	19,610,000	BPBD	Murung Pudak

1	02	01	2019	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	189,294,000	1 Unit	189,294,000	BPBD	Muring Puduk
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	8,056,168,381		8,056,168,381		
1	05	03	201		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				302,664,920		302,664,920		
1	05	03	201	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		-	-	-	-		
1	05	03	201	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 orang	3000 Orang	302,664,920	3000 Orang	302,664,920	BPBD	Muring Puduk
1	05	03	202		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				6,008,922,709		6,008,922,709		
1	05	03	202	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		-	-	-	-		
1	05	03	202	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	-	10 Kawasan	139,224,500	10 Kawasan	139,224,500	BPBD	Muring Puduk
1	05	03	202	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	2,323,740,000	12 Dokumen	2,323,740,000	BPBD	Muring Puduk
1	05	03	202	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	1 Paket	1 Paket	3,097,278,349	1 Paket	3,097,278,349	BPBD	Muring Puduk
1	05	03	202	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	12 Kawasan	3 Kawasan	76,322,350	3 Kawasan	76,322,350	BPBD	Muring Puduk

1	05	03	202	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 Orang	30 Orang	83,225,650	30 Orang	83,225,650	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	202	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	202	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	1000 Orang	68,186,960	1000 Orang	68,186,960	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	202	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	50 KK	20,944,900	50 KK	20,944,900	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	203		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1,376,055,364		1,376,055,364		
1	05	03	203	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	203	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	3 Dokumen	996,223,964	3 Dokumen	996,223,964	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	203	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20 kejadian/orang	40 kejadian/orang	80,000,000	40 kejadian/orang	80,000,000	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	203	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Orang	500 orang	260,327,900	500 orang	260,327,900	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	203	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	203	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	-	2 Dokumen	39,503,500	2 Dokumen	39,503,500	BPBD	Murung Pudak
1	05	03	204		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				368,525,388		368,525,388		

		1	05	03	204	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	2 Dokumen	108,200,000	2 Dokumen	108,200,000	BPBD	Murung Puduk
		1	05	03	204	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	10 Dokumen	59,146,000	10 Dokumen	59,146,000	BPBD	Murung Puduk
		1	05	03	204	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	-	4 Dokumen	33,785,000	4 Dokumen	33,785,000	BPBD	Murung Puduk
		1	05	03	204	06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	3 Dokumen	167,394,388	3 Dokumen	167,394,388	BPBD	Murung Puduk

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

Tabalong, Maret 2025

Kepala Pelaksana
BPBD



HARIS FAKHROZI, ST, MT
NIP. 187210242005011004

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tabalong dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 sesuai dengan Visi, misi serta tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Tabalong.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan suatu acuan dan panduan bagi seluruh unit di lingkungan BPBD Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang evaluasi pelaksanaan rencana Kerja Sampai TW 1 Tahun Berjalan dan capaian rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah, analisis kinerja pelayanan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD serta tujuan dan sasaran rencana kinerja serta Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong untuk tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan BPBD ini akan dituangkan kedalam Program dan Kegiatan setiap tahunnya. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya BPBD Kabupaten Tabalong sebagaimana tertuang dalam Renja Perubahan ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari SKPD/Instansi/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan BPBD ini serta hambatan yang ditemukan, akan tergambar nantinya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang akan disusun setiap tahunnya.